

**PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DI PEDESAAN**

(Studi Upaya Peningkatan Keberdayaan Pengrajin Kain Tenun Sambas Di Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Kalimantan Barat)

*SMALL-SCALE INDUSTRY EMPOWERMENT OF RURAL AREAS*

*(A Research intended to Improve The Empowerment of Sambas Traditional Woven Cloth raftmen at the Village Sumber Harapan District Sambas, Sambas Regency, West Kalimantan)*

Kartika Ningtias

Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Publik, PPSUB

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak

Irwan Noor dan Rijadi Soeprapto

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

**ABSTRACT**

Sambas traditional woven clothes produced in Sumber Harapan Village, Sambas Regency, are not known in neighboring sub-district and regency areas, but also in Pontianak City and even in Malaysia. Although many mid-scale and large organizations went bankrupt because of the tough economic crisis, this small-scale businesses remain operating without any serious hindrance. This proved that small-scale industries do not assign our government any burdens. Concerning this fact, it is recommended that these industries should be empowered.

Underlined by these fact, this study is intend to investigate: (1) Some attempts of sambas woven clothes craftsmen to raise their empowerment in order to optimize their business potentials, (2) Sambas Regency Government and private sector roles, and (3) sambas traditional woven clothes empowerment process in Sumber Harapan Village, Sambas Regency.

The results identify that the craftsmen attempts in optimizing their business potentials contain the following values: (a) economical values, covering income raise, family welfare and family existence and their business; (b) social values, covering aspects of increasing craftsmen dignity and social status in which they should operate their own business instead of being workers; (c) cultural values, covering their braveness, struggle, creativity, productivity and will to improve woven cloth design. The small-scale industries have provided economic sources, but they still cannot improve craftsmen economic continuously.

Sambas Regency Government roles as facilitator agency for the small-scale business has made some efforts by releasing some policies and small-scale industries empowerment. Unfortunately, these efforts has produced optimal outcome. To make the same efforts, private business offers partnership plan through merchandising and production patters.

The craftsmen empowerment is applied through three phases: initial, guidance, help, and establishment. The craftsmen position from their initial existence up to economic

crisis of 1997-1998 is emancipatory position. This position has improved into empowerment process at the second year of the economic crisis.

**Keywords:** Small-Scale Industry, Empowerment, Rural areas

## PENDAHULUAN

Salah satu sektor industri yang cocok untuk dikembangkan di daerah pedesaan adalah industri kerajinan. Industri kerajinan merupakan salah satu bidang yang menduduki tempat yang strategis dalam pembangunan. Ini didasarkan pada dua hal, pertama industri kerajinan sifatnya tidak padat modal tetapi padat karya yang melibatkan masyarakat dalam jumlah yang besar. Dan kedua melalui industri kerajinan ini sekaligus berusaha melestarikan hasil kesenian budaya bangsa.

Dipilihnya industri kecil sebagai salah satu industri yang cocok dikembangkan menurut Irsan (1991) adalah: "...industri kecil memberi akses untuk bergerak pada dimensi pengembangan usaha yang di topang sumber-sumber bahan pertanian dan bahan lokal lainnya, dengan target pemasaran yang umumnya berada dalam lingkup domestik yang terbatas. Atas dasar ini modal yang diperlukan relatif tidak seberapa, sehingga akan memberi peluang kepada para pengusaha kecil untuk mendirikan unit-unit usaha dengan kadar kecanggihan teknik produksi yang mudah dijangkau".

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Tobing (1983) bahwa: "Tumbuhnya industri kerajinan rumah tangga mulanya hanya meruakan suatu pekerjaan sambilan dan kemudian berkelanjutan karena adanya permintaan yang tetap dan menambah penghasilan".

Di sini perlunya suatu pemberdayaan dalam konteks keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Soetrisno (1995) mengemukakan bahwa Pemberdayaan (empowerment) merupakan salah satu strategi pembangunan yang di-

implementasikan dan dikembangkan dalam kegiatan pembangunan terutama negara-negara berkembang. Paradigma pemberdayaan berupaya untuk mengubah kondisi yang serba sentralis ke situasi yang lebih otonomi dengan cara memberikan kesempatan pada kelompok miskin untuk merencanakan dan kemudian melaksanakan program pembangunan yang mereka pilih sendiri.

Diakui bahwa pemberdayaan usaha kecil menghadapi beberapa kendala antara lain: kemampuan dan keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, permodalan dan pemasaran. Kendala-kendala yang dihadapi mengakibatkan sektor ini kalah bersaing. Dari permasalahan kondisi tersebut, maka industri kecil seharusnya diberdayakan agar mampu mengatasi masalah-masalahnya.

Salah satu daerah di Kalimantan Barat yang mempunyai potensi dalam mengembangkan usaha kecil kerajinan tenun sambah adalah Daerah Kabupaten Sambas. Di sisi lain pemahaman akan pentingnya arti pelestarian koleksi budaya agar tidak punah, maka masyarakat di Daerah Sambas, Kalimantan Barat dapat menghargai nilai-nilai warisan budaya dan mendorong para pengrajin di daerahnya agar berproduksi lagi tanpa meninggalkan ciri khas budaya yang dimiliki daerahnya. Untuk itu diperlukan adanya usaha proaktif dari pemerintah, terutama yang berkaitan dengan peranan pemerintah dalam menerapkan konsep-konsep pembangunan yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan yang bermuara pada pemberdayaan industri kecil.

Kain tenun sambah yang dihasilkan oleh Desa Sumber Harapan, Kabupaten Sambas sebagai fokus penelitian tidak

hanya dikenal di sekitar kecamatan dan kabupaten, melainkan juga dikenal oleh kabupaten lain dan Kota Pontianak, Kalimantan Barat bahkan sampai ke negeri Jiran. Akan tetapi beberapa tahun terakhir khususnya pertengahan tahun 1997-1999 usaha ini tidak mengalami kemajuan akibat krisis ekonomi yang melanda belahan dunia. Akibat krisis ekonomi ini berdampak pada biaya produksi menjadi mahal sementara harga jual tetap. Permintaan kain tenun sambas mulai menunjukkan kecerahan memasuki tahun 2000 yang tentunya secara tidak langsung menuntut adanya peningkatan produksi. Walaupun badai krisis telah banyak mengakibatkan pengusaha menengah dan besar gulung tikar, namun industri kecil ini masih tetap eksis. Hal ini membuktikan bahwa industri kecil tidak membebani pemerintah malah sebaliknya. Menyikapi kondisi ini memang layak industri kecil diberdayakan.

Berdasarkan permasalahan pokok tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pengrajin kain tenun sambas di Desa Sumber Harapan, Kabupaten Sambas dalam meningkatkan keberdayaan dirinya untuk memaksimalkan potensi usahanya ?
2. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Sambas dan swasta dalam memberdayakan industri kecil kain tenun sambas di Desa Sumber Harapan, Kabupaten Sambas ?
3. Bagaimana proses pemberdayaan industri kecil kain tenun sambas di Desa Sumber Harapan, Kabupaten Sambas ?

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Untuk mengkaji upaya pengrajin kain tenun sambas di Desa Sumber Harapan, Kabupaten Sambas dalam mening-

katkan keberdayaan dirinya untuk memaksimalkan potensi usahanya.

2. Untuk mengkaji peran Pemerintah Kabupaten Sambas dan swasta dalam memberdayakan industri kecil kain tenun sambas di Desa Sumber Harapan, Kabupaten Sambas.
3. Untuk mengkaji proses pemberdayaan industri kecil kain tenun sambas di Desa Sumber Harapan, Kabupaten Sambas.

### KERANGKA KONSEP

Konsep pemberdayaan memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandas pada sumber daya pribadi, secara langsung melalui partisipasi, demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Sebagai titik fokusnya adalah "lokalitas" dengan asumsi bahwa 'civil society' siap diberdayakan melalui issue-issue lokal. Namun Friedmann mengingatkan, bahwa tidak realistis apabila kekuatan ekonomi dan struktur diluar civil society diabaikan, karena pemberdayaan tidak semata-mata di bidang ekonomi, tetapi juga secara politik, sehingga masyarakat akan memiliki 'bargaining position' secara nasional ataupun internasional.

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan memandirikan, keswadayaan dan keberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimilikinya secara utuh dan komprehensif guna meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari kesenjangan dan keterbelakangan, menjadi upaya memampukan dan memandirikan masyarakat. Kemandirian adalah kemampuan mengakomodasi sifat-sifat baik manusia untuk ditampilkan di dalam sikap dan perilaku yang tepat berdasarkan situasi dan

kondisi yang dihadapi oleh seorang individu. Individu yang memiliki kemandirian akan memiliki dan menunjukkan sifat dan sikap rajin, senang bekerja, sanggup bekerja keras, tekun, berdisiplin, berani berebut kesempatan, jujur, mampu bersaing dan mampu pula bekerjasama, dapat di percaya dan mempercayai orang lain, tidak mudah putus asa dan berusaha mengenali kelemahan dan kekurangannya dan berusaha menolong dirinya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Atau kemandirian merupakan sikap dan perilaku yang dapat mengantarkan manusia untuk meraih sukses yang sebesar-besarnya dalam menjalani hidup dan kehidupan bersama dengan orang lain. Itulah sebabnya, kemandirian merupakan suatu paradigma pembangunan sebagai antitesis dari paradigma ketergantungan (Hettne, 1985).

Keswadayaan sebagai “semangat”, yakni upaya yang didasarkan pada sumberdaya yang dimiliki. Keswadayaan berarti juga semangat untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada pihak luar atau kekuatan dari atas (Raharjo, 1992 dalam Mubyarto, 1994). Pembangunan yang mendasarkan diri pada keswadayaan dapat di lihat sebagai jalan keluar untuk meningkatkan pendapatan, mengatasi kesenjangan dan sekaligus mengingatkan partisipasi wong cilik dalam pembangunan. Keswadayaan akan lebih efektif kalau masyarakat mengorganisirkan diri dalam kelompok-kelompok swadaya masyarakat (Ismawan, 1992).

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan individu-individu lainnya dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Namun, selain nilai fisik di atas, ada pula nilai-nilai Intrinsik dalam masyarakat yang juga

memiliki sumber keberdayaan seperti kekeluargaan dan kegotongroyongan. Keberdayaan masyarakat itu adalah unsur-unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*survive*) dan dalam penger-tian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. (Kartasasmita, 1997). Dengan demikian, dalam proses mewujudkan kemandirian, keswadayaan dan keberdayaan manusia baik untuk sebagai individu maupun dalam kelompok organisasi terus menerus berusaha mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya baik itu sikap dan perilaku yang baik dan positif, semangat untuk membebaskan diri dari ketergantungan pihak luar maupun kemampuan untuk bersenyawa dalam masyarakat dan membangun daya. Sebab, pada hakekatnya inti dari keberdayaan sesungguhnya berasal pada diri manusia / masyarakat. Sedangkan faktor dari luar diri manusia/masyarakat hanyalah berfungsi sebagai stimulus, perangsang munculnya semangat, rasa atau dorongan pada diri manusia untuk memberdayakan dirinya sendiri, untuk mengendalikan dirinya sendiri, untuk mengembangkan dirinya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki.

Masyarakat miskin sudah menemukan “*autonomous energies*” Esman (1983) dalam Tjokroamidjoyo (1987) yaitu kekuatan-kekuatan pembaharuan dalam dirinya untuk mengaktualisasikan segala potensinya. Masyarakat miskin yang telah menemukan *aoutonomous energies*, menurut Hulme dan Turne (1990) pada gilirannya mereka dapat memiliki: percaya diri (*Self Confident*), pengakuan diri (*Self Respect*) dan kemandirian (*Self Relience*). Selain itu mereka dapat keluar dari perangkap kemiskinan, dapat menciptakan nilai tambah serta merekalah yang menghasilkan sendiri sekaligus menikmati.

Ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu: upaya ini harus terarah

(targeted), ini yang secara populer disebut pemihakan yang ditujukan secara langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai dengan kebutuhannya; Program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran, dengan tujuan yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (empowering) masyarakat dengan pengalaman dan merancang, melaksanakan, mengelola, mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya; Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanggulangannya dilakukan secara individu.

Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara bertahap dalam 3 fase, yaitu; fase inisial, semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintah, oleh pemerintah dan diperuntukan bagi rakyat (Pranarka & Prijono, 1996). Pada fase ini rakyat bersifat pasif melaksanakan apa yang direncanakan pemerintah dan tetap tergantung pada pemerintah; fase partisipatoris, proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat dan diperuntukkan bagi rakyat. Kemudian ketika masuk pada fase emansipatoris, proses pemberdayaan ini berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan di dukung oleh pemerintah bersama masyarakat; fase emansipatoris, ini masyarakat sudah dapat menemukan kekuatan dirinya sehingga dapat melakukan pembaharuan dalam mengaktualisasi diri.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu untuk mengungkapkan peristiwa-peristiwa riil di lapangan dan dapat mengungkapkan bentuk, proses, dan tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan, serta peran aktor dalam meningkatkan keberdayaan industri kecil kain tenun sambas di Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Sumber Harapan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dipilihnya Desa Sumber Harapan dilakukan secara sengaja karena beberapa keunikan yang dimilikinya yaitu: Desa Sumber Harapan merupakan tempat pengrajin kain tenun sambas yang pertama dan masih bersifat tradisional serta mempunyai kualitas terbaik jika dibandingkan dengan desa lainnya di Daerah Sambas. Desa ini cukup berhasil dalam mengembangkan industri kecil kain tenun sambas; tingkat partisipasi dan kepedulian masyarakat di Desa Sumber Harapan, Kabupaten Sambas cukup tinggi terhadap pengembangan industri kecil kain tenun sambas; di lokasi penelitian banyak terdapat tenaga kerja produktif yang tidak mempunyai pekerjaan tetap; letak desa ini selain dekat dengan kabupaten dan kota juga berdekatan dengan perbatasan Kalimantan Utara khususnya Sirikin yang jaraknya kurang lebih 60 Km dari Kuching (Sarawak). Selanjutnya untuk memperkaya nuansa data kualitatif dalam penelitian ini, peneliti memilih situs penelitian didasarkan atas kondisi dalam pengumpulan data yang di mulai dari keinginan pengrajin untuk meningkatkan keberdayaan dirinya, bentuk, proses dan strategi pemberdayaan serta peran aktor dalam memberdayakan pengrajin kain tenun sambas. Situasi dan suasana pengumpulan data juga diperoleh di lokasi pengrajin, kantor desa, kantor camat, dinas instansi terkait dalam pemberdayaan

industri kecil dan toko-toko yang menjual kain tenun sambas.

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Pemberdayaan pengrajin industri kecil kain tenun sambas di Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas, Kabu-paten Sambas yang meliputi: permodalan, produksi, pemasaran.

Peranan Pemerintah Kabupaten Sambas dan Swasta dalam pemberdayaan industri kecil kain tenun sambas di Desa Sumber Harapan. Peranan Pemerintah Kabupaten Sambas meliputi: Pola Umum Kebijakan dan Pembinaan Industri Kecil. Program Pemerintah Daerah Sambas dalam Pemberdayaan Industri Kecil. Pelaksanaan Program Pemerintah Daerah Sambas dalam Pemberdayaan Industri Kecil terhadap Industri Kecil Kain Tenun Sambas. Peranan Swasta meliputi : permodalan, teknologi.

Proses pemberdayaan industri kecil kain tenun sambas di Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas meliputi: Proses pemberdayaan tahap inisial, Proses pemberdayaan tahap partisipatoris, Proses pemberdayaan tahap emansi-patoris.

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan, sebagai sumber data utama digali melalui wawancara mendalam dengan para informan. Informan dipilih secara purposive artinya pemilihan informan ini di pilih secara sengaja didasarkan atas subyek yang menguasai permasalahan yang berkenaan dengan fokus penelitian dan bersedia memberikan data.

Teknik Pengumpulan Data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumen. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan interative model analysis. Pada model analisis ini peneliti bergerak pada tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pengrajin Kain Tenun Dalam Meningkatkan Keberdayaan Dirinya Untuk Memaksimalkan Potensi Usahanya.

Upaya pengentasan kemiskinan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pedesaan bertujuan untuk memberi ruang gerak, fasilitas publik dan kesempatan-kesempatan yang kondusif bagi tumbuhnya kemampuan dan kemungkinan kelompok masyarakat miskin untuk mengatasi masalah mereka sendiri, dan tidak untuk justru menekan dan mendesak mereka ke pinggir atau ke posisi ketergantungan.

Pada dasarnya setiap manusia memiliki potensi, memiliki daya untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik dan bersifat aktif dalam upaya peningkatan keberdayaan dirinya, maka hakekat dari pemberdayaan tersebut adalah berada pada diri manusia itu sendiri sedangkan faktor di luar diri manusia hanyalah berfungsi sebagai stimulus, perangsang munculnya semangat, rasa atau dorongan pada diri manusia untuk memberdayakan dirinya sendiri, untuk mengendalikan dirinya sendiri, untuk mengembangkan dirinya sendiri berdasarkan potensi yang dimilikinya.

Karakteristik kemiskinan dan keterbelakangan penduduk antara lain adalah : (1) sebagian besar kelompok penduduk yang miskin tinggal di daerah pedesaan; (2) banyak di antaranya yang menganggur dan setengah menganggur; (3) jika mereka mempunyai usaha sendiri biasanya alat yang digunakan sewaan dari orang lain, kurang modal dan usaha nya kecil-kecilan; (4) kebanyakan mereka tidak mempunyai skill dengan tingkat pendidikan yang rendah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah digeneralisasikan dimuka, maka

kendala-kendala yang ada dapat peneliti jabarkan kedalam empat aspek kendala umum industri kecil kain tenun sambah di Desa Sumber Harapan, yaitu : (1) Kurangnya ketrampilan pengrajin pada alat tenun mesin (ATM), yang mengakibatkan jika terdapat banyak pesanan/order atau terdapat tambahan permintaan dari konsumen mengalami kesulitan untuk memenuhi sesuai dengan jumlah dan waktu yang diminta; (2) Modal usaha terbatas, sehingga sulit untuk meningkatkan usaha dan memperbaiki atau memperbaharui peralatan tenun; Mengakses modal formal mengalami kesulitan karena persyaratannya sulit untuk dipenuhi; (3) Peralatan yang digunakan pengrajin masih secara tradisional yaitu alat tenun bukan mesin (ATBM), selain itu peralatan tenun juga terbatas dimana mengakibatkan proses produksi tidak optimal; (4) Pengrajin tidak memiliki show room sendiri untuk memasarkan hasil produksinya; Tidak adanya ketetapan harga jual tenunan dari pengrajin; Kadangkala barang yang sudah dipesan tidak diambil; (5) Pemasarannya masih dominan bersifat lokal dan belum terjangkau ekspedisi keluar seluruh wilayah; (6) Rendahnya pemahaman manajemen usaha.

Para pengrajin industri kecil kain tenun sambah di Desa Sumber Harapan lebih dominan memberdayakan diri sendiri dengan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki. Sungguhpun demikian, hal ini cukup positif untuk pemberdayaan selanjutnya, di mana pemerintah sudah memulai mengawali untuk memberi perhatian dalam pemberdayaan industri kecil pada umumnya dan industri kecil kain tenun sambah khususnya di Desa Sumber Harapan, Kabupaten Sambas.

Demikian juga dengan lembaga perbankan sebagai kekuatan kelompok ekonomi (*Corporate Economy*) yang dikategorikan oleh Friedmann (1992) menunjukkan peranannya. Dalam pene-

litian menemukan bahwa ada beberapa pengrajin industri kecil kain tenun sambah dapat mengakses kredit dari perbankan, namun tidak sedikit yang mengalami kesulitan dalam mengakses kredit dari lembaga perbankan. Kendala pelayanan kredit kepada pengrajin tenun merupakan hal yang saling mempengaruhi, baik dari sisi pengrajin tenun itu sendiri sebagai nasabah maupun lembaga keuangan sebagai kreditor. Pada sisi nasabah, pengrajin tenun sambah dinilai tidak memenuhi kualifikasi perbankan. Pihak perbankan mensyaratkan lima kriteria yang dikenal dengan 5C yaitu karakter (*Character*), jaminan (*Collateral*), kemampuan untuk membayar kembali (*Capacity to repay*), modal (*capital*), kondisi ekonomi (*condition of economy*) (Sumodiningrat, 1998). Kriteria inilah yang umumnya diterapkan oleh lembaga keuangan formal.

Sebagian besar pengrajin kecil industri kain tenun sambah tidak dapat memenuhi kriteria yang diisyaratkan oleh perbankan, akibatnya adanya kesenjangan pengrajin industri kecil kain tenun sambah dalam hal menjangkau lembaga keuangan akan semakin besar. Menyadari kendala yang dialami dalam mengakses kredit perbankan, pengrajin industri kecil kain tenun sambah cenderung menggunakan perkreditan informal yakni meminjam tambahan modal dari pemilik show room yang sifatnya tentatif untuk kepentingan mendesak dan bukan penyertaan modal. Pola pinjam meminjam ini diatur dengan kontrak yang tidak resmi artinya pemilik show room tidak keberatan memberi pinjaman modal asalkan produksi kain tenun sambahnya dipasarkan oleh pemilik show room yang memberi pinjaman. Mencermati fenomena ini, wajar kiranya ada lembaga pendamping dan penjamin agar para pengrajin industri kecil kain tenun sambah dapat mengakses kredit perbankan untuk tambahan modal usaha.

Dengan menggunakan jasa para pemilik show room ini untuk tambahan modal yang bersifat tentatif dari suatu sisi bersifat positif bagi pengrajin industri kecil kain tenun sambas. Namun dari sisi negatifnya juga ada, dimana total pinjaman tidak besar dan jangka waktu pendek, hal ini disadari pula bahwa para pemilik show room juga tidak memiliki modal yang besar. Sisi negatif lainnya adalah proses kredit informal ini akan mengakibatkan ketergantungan pengrajin industri kecil kain tenun sambas, mereka tidak dapat mengembangkan inovasi dan kreativitas serta tidak dapat meningkatkan produktivitasnya. Biasanya yang diuntungkan dalam pola kredit informal ini adalah para pemilik show room, sebab bantuan modal usaha dengan pola kredit informal ini mereka (pengrajin tenun) memiliki posisi yang lemah dalam menentukan nilai jual produksinya karena sebelumnya sudah ada perjanjian untuk menyetero hasil tenunan kain tenun sambas untuk dipasarkan oleh pemberi pinjaman.

Jasa perkreditan informal ini umumnya tidak mampu meningkatkan kesejahteraan pengrajin industri kecil kain tenun sambas, karena tidak mampu menciptakan kapitalisasi, akibatnya pengrajin industri kecil kain tenun sambas tidak mampu menciptakan akumulasi modal sebagai salah satu faktor produksi dalam kegiatan ekonomi mereka. Pelayanan kredit demikian hanya mampu memberikan pelayanan yang bersifat gali lobang tutup lobang, sekedar untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya tetapi tidak mampu meningkatkan mengembangkan usahanya. Melihat kondisi demikian wajar kiranya bahwa kegiatan industri kecil kain tenun sambas memberikan sumber kehidupan ekonomi bagi pengrajinya khususnya dan masyarakat umumnya, namun belum sepenuhnya mampu meningkatkan perekonomiannya secara berkesinambungan. Kegiatan industri kecil kain tenun sambas

memberikan sumber kehidupan ekonomi bagi pengrajinya namun belum sepenuhnya mampu meningkatkan perekonomiannya secara berkesinambungan.

Berkenaan dengan hal tersebut Kartasasmita (1996) dalam pemberdayaan masyarakat mengungkapkan bahwa secara praktis upaya pengerahan "sumberdaya" untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat akan berakibat meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam di sekitar keberadaan rakyat dapat pula ditingkatkan produktivitasnya. Dengan demikian, rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Pada akhirnya masyarakat menengah ke bawah yang berada pada posisi yang belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pemberdayaan tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya.

Selanjutnya Tjokrowinoto (1996) menyatakan bahwa pengelolaan sumberdaya lokal merupakan mekanisme perencanaan *people-centered development* yang menekankan pada teknologi *social learning* dan strategi perumusan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengaktualisasikan diri mereka (*empowerment*). Dengan adanya upaya pemanfaatan potensi yang ada pada masyarakat lokal, maka langkah berikut yang sangat penting adalah "pengakuan hak" terhadap pengelolaan potensi tersebut. Tanpa adanya pengakuan hak oleh pihak luar atas pengelolaan potensi tersebut, maka upaya pemberdayaan yang dilakukan akan menjadi sia-sia (Schumacher, 1979). Masyarakat harus diberi keleluasaan dalam memanfaatkan segala potensinya sesuai



dengan perencanaan yang dibuat sendiri (bottom up), agar mereka dapat meningkatkan kemampuan perekonomiannya dan pada akhirnya mereka tidak tergantung kepada pihak luar.

Penelitian yang dilakukan terhadap pengrajin industri kecil kain tenun sambahas menunjukkan bahwa pemanfaatan sumberdaya oleh pengrajin melalui tiga cara: (1) Memulai usaha dengan keberanian dan jiwa wira usaha (entrepreneur), (2) Usaha industri kecil kain tenun sambahas sama dengan teknologi tepat guna dan sederhana, (3) Menjalinkan kemitraan dengan sistem pola dagang dengan pihak swasta yakni para pemilik show room, pedagang penyalur dan pedagang perantara serta tengkulak.

Walaupun usaha ini telah memberikan kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat sekitar, akan tetapi usaha ini belum mampu mengangkat perekonomian mereka kearah yang jauh lebih baik. Dari penjelasan mereka masih sering keluar kata-kata kekurangan modal, ketidakberdayaan dan lain sebagainya, terutama semenjak krisis ekonomi yang menimpa negeri ini mulai berlalu. Masalah modal ini merupakan kendala besar bagi pengrajin industri kecil kain tenun sambahas, agar dapat menjalankan dan mengembangkan usaha industri kecil kain tenun sambahas ada kecenderungan bahwa industri yang beroperasi sekarang ini dengan modal yang sangat terbatas, pengrajin berproduksi sesuai dengan pemberi pesanan dengan demikian pengrajin kurang bisa meningkatkan inovasi dan kreativitasnya, jika gejala ini tidak dicermati dan disikapi dengan baik, segera serta dibiarkan berkembang terus dalam keadaan seperti ini maka hal ini sangat membahayakan untuk kelangsungan usahanya sehingga lambat laun para pengrajin akan turun derajatnya dari pengrajin sebagai pekerja.

Selanjutnya keberlanjutan (sustainability) usaha industri kecil kain tenun sambahas harus dipikirkan, karena faktor

peningkatan ekonomi ini membutuhkan ketenangan dan kenyamanan untuk melakukan usaha, hendaknya usaha industri kecil kain tenun sambahas ini tidak berhenti sampai disini saja, harus ada keberlanjutan, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa mendatang. Hal senada dipertegas dari laporan World Commission (1987), bahwa sustainability diartikan sebagai "suatu pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kebutuhan generasi masa datang". Resiko dan konsekuensi dari setiap pembangunan saat ini hendaknya jangan semuanya diwariskan kepada generasi mendatang melainkan harus dipertimbangkan secara adil bagi generasi sekarang dan generasi mendatang, sehingga pembangunan bisa terlaksana secara berkesinambungan (sustainable development).

Kegiatan industri kain tenun sambahas menciptakan masyarakat industri kecil kain tenun sambahas model kemitraan dengan pola produksi dan pola dagang. Semua elemen-elemen masyarakat tersebut satu sama lainnya saling berkaitan dan berhubungan dan saling menunjang dalam kegiatan industri kain tenun rakyat (kain tenun sambahas). Para pemilik show room, pedagang pengumpul dan pedagang perantara misalnya berperan dalam memasarkan produksi industri kecil kain tenun sambahas. Home industry berperan dalam finishing proses produksi. Demikian juga halnya dengan pemilik toko bahan baku yang menyediakan bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi.

Pemberdayaan masyarakat industri kain tenun sambahas di atas terjalin suatu sistem model kemitraan, yang pasti dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang nyata-nyata terjadi adalah: Pertama, kemitraan pola dagang dengan para pemilik show room, pedagang pengumpul dan perantara. Dalam kemitraan pola dagang ini para pemilik show room, pedagang pengumpul dan perantara yang

memasarkan seluruh produksi industri kecil kain tenun sambas. Dalam kemitraan pola dagang ini, para pemilik show room tidak keberatan memberikan pinjaman modal pengembangan usaha kepada pengrajin industri kecil kain tenun sambas. Demikian juga sebaliknya, pengrajin industri kecil kain tenun sambas akan memproduksi kain tenun sambas berdasarkan pesanan pemilik show room baik itu dari segi jumlah maupun dari jenis dan desain produksi. Pada saat pesanan meningkat, kadang kala pengrajin tidak mampu karena keterbatasan tenaga dalam menenun kain tenun sambas, pada saat inilah pengrajin industri kecil kain tenun sambas bermitra dengan home industry untuk memproduksi kain tenun sambas, biasanya segala bahan baku dan peralatan disediakan oleh pengrajin. Setelah kain tenun sambas siap untuk produksi baru diserahkan kembali kepada pengrajin industri kecil kain tenun sambas. Demikian juga halnya pada tahap finishing proses produksi, tidak semua produksi kain tenun sambas yang telah jadi langsung dapat dipasarkan, biasanya ada tahap akhir untuk memperindah dan mempercantik tampilan kain tenun sambas dengan memberi pernik benang emas atau benang perak bersulam di bagian tertentu pada kain tenun sambas. Pekerjaan finishing ini dilakukan oleh home industry. Kedua pola kemitraan ini lebih bersifat saling menguntungkan dan saling keterkaitan satu sama lainnya. Pemberdayaan yang ditemukan dalam penelitian tentang industri kecil kain tenun sambas kecenderungan industri kecil ikut memberdayakan industri rumah tangga (home industry).

#### **Peranan Pemerintah dan Swasta Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Kain Tenun Sambas**

Upaya memberdayakan masyarakat miskin harus dilakukan dari tiga arah,

pertama: menciptakan suasana/ iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling), kedua: memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering) dan ketiga: melindungi pihak yang lemah agar jangan bertambah menjadi lemah, mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi yang kuat atas yang lemah (Kartasasmita 1996). Seperti yang dikatakan Friedmann (1992) bahwa diperlukan adanya aktor (organizer) yang mampu memainkan atau menggerakkannya.

Penelitian pengrajin industri kecil kain tenun sambas ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkannya peran aktor (organizer) dari luar sebagai stimulus untuk mendampinginya, walaupun kekuatan rakyat sendiri telah muncul yang ditunjukkan oleh pengrajin industri kecil kain tenun sambas itu berada pada fase emansipatoris, akan tetapi masih terlihat keinginan dari sebagian besar pengrajin yang masih membutuhkan peran kekuatan dari luar untuk mendorong mereka agar lebih berdaya (empowerment), seperti yang diungkapkan oleh berapa pengrajin industri kecil kain tenun sambas bahwa mereka berharap, jika ada modal yang lebih besar dan jika ada bantuan dari pihak pemerintah dalam hal modal pengembangan usaha, maka mereka akan mengembangkan usahanya dengan mendirikan juga show room-show room. Dalam hal ini peran Pemerintah Daerah Sambas diharapkan oleh pengrajin industri kecil kain tenun sambas di Desa Sumber Harapan Kabupaten Sambas dalam rangka meningkatkan keberdayaan dirinya.

Program-program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas dalam meningkatkan pendapatan pengrajin kain tenun sambas di Desa Sumber Harapan, secara umum telah mendapat prioritas dalam program pembangunan daerah. Program-program khusus terkait dengan

upaya pemberdayaan industri kecil kain tenun sambas seharusnya secara berkesinambungan dilaksanakan setiap tahun melalui evaluasi program. Program yang direncanakan ternyata tidak berkesinambungan maka proyek yang dilaksanakan hanya bersifat parsial (sendiri-sendiri).

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam meningkatkan keberdayaan para pengrajin kain tenun sambas di Desa Sumber Harapan antara lain, berupa kegiatan yang bersifat pembinaan dan penyuluhan teknis, pemberian bantuan peralatan produksi, bantaaun operasional dana bergulir maupun kegiatan latihan. Selain itu kegiatan pelatihan tidak hanya diberikan kepada para pengrajin saja tetapi unsur birokrasi juga dilaksanakan pelatihan hal tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang out come diharapkan mampu meningkatkan kinerja mereka.

Bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah baik berupa peralatan maupun modal bergilir masih bersifat terbatas, belum menyentuh ke substansi upaya peningkatan keberdayaan pengrajin kain tenun sambas. Pada tataran konsep pemberdayaan temuan di obyek penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat miskin masih dalam taraf partisipatoris belum emansipatoris. Pada tahapan partisipatoris proses pemberdayaan masih berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat diperuntukan bagi rakyat. Masyarakat dalam hal ini dilibatkan dalam mengelola permodalan bergilir dalam kelompok mereka. Tetapi kendali dan peranan masih dominan pada pemerintah daerah. Oleh karena itu ketergantungan masih besar kepada birokrasi pemerintah daerah.

Bantuan peralatan sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa sebagian peralatan ada yang tidak memenuhi persyaratan untuk membantu proses produksi

malah membutuhkan waktu yang lebih lama dengan menggunakan peralatan tersebut. Oleh karenanya pengrajin kain tenun sambas sebagian peralatan yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak digunakan. Dalam hal ini pihak birokrasi pemerintah daerah seharusnya mampu memberikan peralatan yang tepat secara teknis sehingga mampu membantu meningkatkan produksi mereka.

Sebenarnya potensi untuk mengembangkan diri untuk menuju keberdayaan pengrajin kain tenun sambas di Desa Sumber Harapan cukup besar. Pemerintah daerah seharusnya mampu memfasilitasi potensi yang ada melalui studi kelayakan agar setiap program yang direncanakan pemerintah daerah mampu meningkatkan keberdayaan pengrajin kain tenun sambas.

Mereka belum mampu mengatasi kekuatan besar yang berada di luar jangkauannya, masalah yang mereka temui dari pihak luar belum mampu diatasi sendiri, seperti masalah terbatasnya akses mereka untuk mendapatkan pinjaman modal karena tidak ada legalitas usaha dan jaminan serta tidak adanya lembaga penjamin agar lembaga perbankan mau memberikan kredit yang dibutuhkan.

Dengan munculnya kekuatan dari rakyat untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapinya, ini merupakan pertanda awal dari kebangkitan kesadaran masyarakat untuk menuju kepada keberdayaan dirinya, seperti di kemukakan oleh Mubyarto (1994:36) bahwa jika kunci untuk mengentaskan rakyat dari ketidakberdayaan berada pada "kekuatan rakyat sendiri" maka hal itu sama artinya dengan upaya pemberdayaan rakyat atau penguatan rakyat. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki kekuatan untuk mengontrol masa depannya sendiri, sedangkan pihak luar dapat mengembangkan daya itu.

Dalam mengembangkan potensi industri kecil, terlebih dahulu harus dipahami masalah-masalah yang dihadapi oleh industri kecil serta dinamika yang

terjadi didalamnya. Pemahaman ini penting agar mampu menciptakan strategis yang tepat guna pemberdayaan dan pengembangannya. Strategi pemberdayaan industri kecil diartikan suatu tindakan yang diambil untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan, maupun sumber daya alam untuk meningkatkan ketangguhan, kemandirian dan keberdayaan pengembangan industri kecil kain tenun sambas, sehingga secara efektif dan terukur pemberdayaan terhadap industri kecil dapat diketahui tingkat keberhasilan.

Implementasi pemberdayaan industri kecil pertama-tama harus dimulai dengan menetapkan terlebih dahulu ukuran keberhasilan yang ingin dicapai dan waktu berapa lama, misalnya konsep ketangguhan, kemandirian dan pengembangan industri kecil harus didefinisikan secara operasional dengan tetap mengacu pada modal kerja dan kapasitas produksi dari industri tersebut. Selanjutnya fokus pemberdayaan diarahkan pada skala prioritas dari tujuan yang ditetapkan yang mungkin aktor terkait dalam pemberdayaan memiliki kemampuan agar upaya tersebut menjadi kenyataan.

Aktivitas selanjutnya melakukan identifikasi kendala yang paling dominan yang menghambat tujuan pemberdayaan. Dari kendala-kendala tersebut dicarikan solusi yang efektif guna merealisasikan tercapainya tujuan pemberdayaan melalui metode, materi, jumlah dan keahlian instruktur dan aktivitas lain yang mendukung keberhasilan pemberdayaan tersebut. Kemudian menentukan metode, materi tenaga instruktur dan aktivitas-aktivitas lain yang meliputi: (a) Pelatihan praktek; (b) Transfer pengetahuan atau wawasan dan manajemen usaha; (c) Pendampingan dan konsultasi; (d) Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif; (e) Bantuan peralatan produksi; (f) Bantuan modal kerja; (g) Perlindungan usaha dan pemberian merk produk; (h)

Jumlah dan keahlian instruktur; (i) Studi banding; (j) Promosi.

Aktivitas berikutnya adalah penyusunan jadwal pemberdayaan dan koordinasi antara instansi terkait sehingga dapat didesain model pemberdayaan yang melibatkan pihak yang selama ini memiliki tanggung jawab terhadap Industri kecil agar dapat mandiri, tangguh dan berkembang. Strategi Pemberdayaan industri kecil di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada rakyat hendaknya pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang bersifat pro-aktif, dengan cara terjun dan berdialog langsung dengan masyarakat, sebagaimana yang diutarakan Yen (1920) seorang pendiri Gerakan Rekonstruksi Desa di Cina. Selain pemerintah daerah yang memberi perhatian besar bagi perkembangan industri kecil kain tenun sambas di Desa Sumber Harapan pihak swasta pun ternyata sangat besar andilnya di dalam upaya untuk meningkatkan keberdayaan pengrajin kain tenun sambas, karena keberadaan industri kecil kain tenun sambas memberikan keuntungan bagi mereka dan juga memberikan keuntungan kepada pengrajin itu sendiri didalam pemasarannya.

Menurut Antjok (1995) mengingatkan keharusan untuk menghindari adanya upaya meremehkan kekuatan rakyat sendiri, sehingga justru akan memperdayakan rakyat dan menghilangkan kekuatannya. Ketidakadilan yang menimpa masyarakat miskin terpancar dalam kasus yang bisa dikategorikan ke dalam kolusi pe-ngusaha-pengusaha atau dikenal juga sebagai sebuah kerjasama antara modal dengan negara. Sedapat-dapat mungkin modal (pengusaha) memanfaatkan negara (pengusaha) dengan jalan memanfaatkan rezim-rezim untuk memuluskan proses-proses reproduksi dirinya.

Pengrajin kain tenun sambas menjalankan usahanya sekian lama, masih menggunakan manajemen usaha

tradisional. Wujudnya adalah pelibatan badan usaha berupa wadah perkumpulan pengrajin kain tenun sambas dengan para pengusaha swasta (pemilik toko/show room), pedagang pengumpul, pedagang penyalur sehingga terwujud pola pemasaran kain tenun sambas di mana telah menciptakan pemberdayaan masyarakat industri kecil kain tenun sambas di Desa Sumber Harapan.

Selama ini pihak swasta (pemilik show room) tidak keberatan bermitra bersama pengrajin dengan memberikan modal bersifat tentatif (pinjaman sementara) bukan penyertaan modal dan bahan baku untuk keperluan menenun dengan suatu "ikatan perjanjian" bahwa apabila hasil tenunan sudah selesai diproduksi maka pengrajin diharuskan menjual kepada pemberi modal tersebut.

Pemasaran lebih dominan dikuasai oleh pihak swasta (pemilik show room), pengrajin kain tenun sambas banyak mendapatkan teknologi baru yaitu tentang desain berupa motif, bentuk, dan warna yang paling diminati oleh para konsumen (lagi ngetren) dari para pemilik show room. Hal ini terjadi karena para pemilik show room yang berhadapan langsung kepada konsumen, yang berakibat dari sistem adanya ikatan perjanjian dalam pemberian modal usaha dan pemberian bahan baku dimana hasil tenunan harus semuanya dijual kepada pemberi modal, berakibat tidak adanya keluasaan para pengrajin di dalam penentuan pangsa pasar. Dengan demikian di dalam sistem pola kredit informal yang ini, posisi pengrajin tenun memiliki posisi yang lemah di dalam menentukan nilai jual produksinya.

#### **Pemberdayaan Pengrajin Industri Kecil Kain Tenun Sambas di Desa Sumber Harapan**

Pemberdayaan masyarakat miskin dapat mempertahankan budaya lokal yang

merupakan nilai-nilai indigenous yang merupakan nilai-nilai positif yang sangat membantu di dalam memperkuat dan mempertahankan identitas masyarakat pedesaan. Sedangkan dari aspek internal, semua pihak harus mempersiapkan diri untuk mengantisipasi dan mengambil manfaat sebesar-besarnya seiring dengan masuknya kekuatan-kekuatan global ke dalam kehidupan kebangsaan, kenegaraan dan kemasyarakatan. Dalam kerangka ini dibutuhkan kerjasama dengan semangat solidaritas antara masyarakat kuat dan masyarakat lemah/miskin sesuai dengan nilai-nilai indigenous dalam masyarakat desa itu. (Pranarka dan Prijono, 1996)

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan ini bisa juga disebut dengan kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan ke dua yaitu kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Penelitian yang dilakukan tentang pengrajin industri kecil kain tenun sambas menunjukkan bahwa usaha yang dilaksanakan sudah mengacu kepada pembangunan yang berpusat kepada rakyat (people centered), melibatkan partisipasi (participatory), mengarah kepada peningkatan pemberdayaan (empowerment), sebagaimana yang dikemukakan Korten di atas. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya usaha industri kecil kain tenun sambas yang dilakukan

dari, oleh dan untuk masyarakat sekitar, dan usaha tersebut mengarah kepada peningkatan ekonomi dalam rangka meningkatkan kemandirian dan ketangguhan untuk mengatasi kekurangan yang dialami mereka. Hanya saja usaha yang dilakukan tersebut terancam keberlanjutannya (sustainable), karena kendala yang ditemui mereka seperti tidak adanya modal untuk mengembangkan usaha dan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasinya.

Pada waktu masa krisis ekonomi tersebut boleh dikatakan pengrajin industri kecil kain tenun sambah berada pada posisi tahap emansipatoris secara ekonomi, karena mereka telah mempunyai *autonomous energies* dalam melakukan usaha agar lebih berhasil, hal ini setidaknya terlihat dari keseriusan dan tingginya semangat, serta kreativitas yang mereka lakukan dalam meningkatkan perekonomian. Mereka pada waktu itu tidak terlalu mengharapkan bantuan dari orang lain atau bantuan dari pemerintah daerah, akan tetapi pada waktu itu pemerintah daerah sangat mendukung usaha ini. Di samping itu untuk ke depan, pemerintah daerah sangat mendukung usaha ini, tidak ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk merugikan pengrajin industri kecil kain tenun sambah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa posisi pengrajin industri kecil kain tenun sambah jika dilihat dari awal keberadaan usahanya pada saat krisis ekonomi tahun 1997 akhir, berada pada tahap emansipatoris, alasannya karena usaha ini menjadi pilihannya adalah datangnya dari ide mereka, dikerjakan dan diusahakan oleh mereka dan keuntungan maupun kerugian diperuntukkan bagi mereka dan usaha ini didukung sepenuhnya oleh pemerintah bersama rakyat, akan tetapi saat mulai berlalunya badai krisis ekonomi, usaha mereka mulai mengalami siklus kemunduran sehingga mereka kembali berada pada tahap partisipatoris dalam proses pemberdayaan. Jadi pada

hakekatnya untuk mengembalikan posisi mereka kepada tahap emansipatoris diperlukan adanya dukungan dari semua pihak dan cara penanganannya oleh "aktor" pemberdayaan antara tahap emansipatoris tentu sangat berbeda dengan tahap partisipatoris.

Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan situasi dan kondisi mereka. Jika kondisi pengrajin industri kecil kain tenun sambah tersebut berada pada posisi emansipatoris, maka pemerintah daerah dalam hal ini dalam melakukan pemberdayaan hendaknya sesuai dengan posisi mereka tersebut, misalnya pengrajin industri kecil kain tenun sambah sedang melakukan usaha yang telah dirintisnya dan mereka membutuhkan modal untuk pengembangan usaha mereka, maka pemerintah dalam melakukan proses pemberdayaan alangkah baiknya membantu mencari jalan keluar (memfasilitasi), bagaimana supaya mereka mendapatkan modal dan usaha tersebut dapat berkembang dengan baik. Pemerintah dalam hal ini tidak mutlak harus menyediakan dan mencari modal pengembangan usaha, akan tetapi pemerintah cukup sebagai lembaga penjamin bagi pengrajin industri kecil kain tenun sambah.

Dalam mengembangkan perekonomian rakyat ini aspek keadilan dan pemerataan harus dijadikan kebijaksanaan utama, karena dengan mengedepankan aspek tersebut maka tujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera akan tercapai seperti yang ditegaskan oleh Mubyarto (1999), bahwa tujuan akhir pembangunan ekonomi Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang sebagian besar masih hidup dalam serba kekurangan, kebodohan, dan keterbelakangan harus menjadi acuan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan.

Implementasi pengembangan ekonomi rakyat tersebut harus tercermin pada

sikap lembaga-lembaga keuangan di daerah yang harus siap untuk membantu usaha kecil ini. Bagaimana agar pengrajin industri kecil kain tenun sambah dapat dengan mudah memperoleh modal usaha dengan lancar dan bunga rendah, yang paling penting adalah pemerataan dalam pemberian kredit terhadap usaha ini, agar dapat menjangkau seluruh pengrajin industri kecil kain tenun Sambah. Masalah keadilan dan pemerataan ini sangat penting untuk menghindari terjadi kesenjangan ekonomi diantara sesama pengrajin industri kecil kain tenun sambah khususnya di Desa Sumber Harapan, yang pada akhirnya ber-tujuan untuk mencegah terjadinya konflik sosial diantara sesama pengrajin industri kecil kain tenun sambah tersebut.

Dalam kondisi seperti itu untuk dapat meningkatkan usahanya, sebenarnya dituntut peran pemerintah untuk dapat membantu pengrajin industri kain tenun sambah, seperti yang diungkap oleh Giddens (1999) pemerintah kadang-kadang perlu masuk jauh ke dalam arena masyarakat, kadang-kadang mundur dari arena itu, tergantung konteksnya. Dalam hal ini pengrajin industri kecil kain tenun sambah sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk menopang keberlanjutan usahanya, barangkali tidak ada salahnya pemerintah ikut campur lebih jauh sepanjang tujuannya untuk memberdayakan pengrajin industri kecil kain tenun sambah.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pengrajin industri kecil pada umumnya. Salah satu wujud program tersebut adalah dengan adanya proyek bantuan modal usaha bagi industri kecil sebesar Rp.260.000.000,- untuk 10 tahun ke depan, sifat bantuan modal usaha ini adalah bantuan dana bergulir yang disalurkan melalui kelompok-kelompok usaha, hanya saja proyek bantuan dana bergulir ini belum menyentuh pengrajin industri kecil kain tenun sambah pada

umumnya dan pengrajin tenun sambah di Desa Sumber Harapan, Kabupaten Sambah pada khususnya karena di Industri-industri kecil kain tenun sambah belum terbentuk kelompok usaha bersama.

Pemerintah Daerah Sambah dan instansi terkait langsung dalam pemberdayaan industri kecil harus mempunyai konsep transparansi dalam menjalankan tugasnya. Bantuan modal usaha yang diperuntukkan bagi pengrajin kecil harus jelas dan manajemenya transparan dan harus tepat sasaran. Bertumpu pada kondisi pengrajin industri Kain Tenun Sambah, beberapa tahap pemberdayaan yang diperlukan adalah pemberdayaan individu dan pemberdayaan kelompok/ ikatan antar individu yang merupakan "spiral models".

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun secara kelompok. Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial atau status hirarki lain yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi maka kemampuan individu 'senasib' untuk berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang efektif atau biasa disebut 'collective self-empowerment' (Friedman, 1992). Dalam kelompok terjadi suatu dialogical encounter yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok. Anggota kelompok menumbuhkan identitas seragam dan mengenali kepentingan mereka bersama.

Schumacher (1979) menyatakan bahwa dalam proses empowerment percaya bahwa manusia itu mampu untuk membangun diri mereka sendiri tanpa mengharuskan terlebih dahulu menghilangkan ketimpangan struktural yang ada dalam masyarakat. Schumacher mengatakan bahwa strategi yang paling tepat untuk menolong si miskin adalah memberi kail dari pada ikan dengan demikian mereka dapat mandiri, Schumacher sangat memberi tempat yang istimewa bagi

kelompok NGO (Non Governmental Organisation) dalam proses pembangunan. Penekanan konsep empowerment oleh Schumacher yang lebih memfokuskan pada pembentukan kelompok mandiri tidak akan banyak mempunyai arti tanpa ada dukungan politik. Hal ini berarti konsep empowerment apapun yang akan dipilih dibutuhkan dosis politik untuk menjadi obat yang ampuh bagi penyakit kemiskinan .

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Pemberdayaan industri kecil kain tenun sambas di Desa Sumber Harapan mengandung nilai-nilai : ekonomis, meliputi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga serta kelangsungan hidup keluarga dan usahanya. Sosial, memuat aspek peningkatan harkat dan martabat pengrajin industri kecil kain tenun sambas serta status sosial yang semula sebagai pekerja menjadi pengrajin yang memiliki industri sendiri. Sedangkan budaya, ditunjukkan dengan adanya keberanian, semangat juang, kerja keras, kreativitas, produktivitas dan adanya kemauan untuk belajar meningkatkan desain tenunan sambas.

Pemerintah Kabupaten Sambas melakukannya melalui kebijaksanaan dan penyusunan program pemberdayaan industri kecil serta pemberian kebebasan yang cukup besar, ataupun suatu usaha pembangunan berencana di mana memberi peranan dalam pengarahan serta melakukan secara tidak langsung untuk merangsang perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat Desa Sumber Harapan. Sedangkan pihak swasta didalam pemberdayaan industri kecil kain tenun sambas menciptakan pola kemitraan dengan pola dagang dan pola produksi.

Proses pemberdayaan pengrajin kain tenun sambas di Desa Sumber Harapan melalui tiga tahap, yakni tahap inisial di mana pemerintah setempat berperan aktif dengan ikut serta mendukung usaha tersebut dengan memberikan bantuan, promosi dan latihan-latihan walaupun belum dirasakan sepenuhnya oleh para pengrajin. Sejak awal keberadaan kerajinan kain tenun sambas sampai tahun 1997 akhir, posisi pengrajin kain tenun sambas berada pada tahap emansipatoris namun semenjak datangnya krisis ekonomi pada akhir tahun 1998 usaha mereka mengalami kemunduran sehingga posisi mereka masuk pada tahap proses pemberdayaan partisipatoris.

### Saran-saran

Perlunya peran Pemerintah Kabupaten Sambas sebagai aktor utama dalam pemberdayaan industri kecil kain tenun sambas menempatkan diri sebagai fasilitator kiranya lebih ditingkatkan, khususnya yang berkaitan dengan proses perizinan dan pengurusan merk dagang. Dalam situasi persaingan yang tajam produk-produk yang diluncurkan ke pasar agar di kenal konsumen harus melalui merk. Salah satu fungsi merk adalah untuk memudahkan bagi konsumen mencari dan menemukan produk yang dibutuhkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam program pemberdayaan bagi industri kecil dalam rangka membantu pemenuhan kebutuhan modal kerja bagi industri kecil kain tenun sambas perlu adanya membentuk lembaga penjamin.

Perlunya model pendamping, untuk memenuhi tenaga pendamping bisa dari instansi setempat ataupun melalui salah satunya dapat dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi misalnya melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa, melalui fa-kultas yang berkaitan dengan program pemberdayaan industri kecil.



Perlunya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas menyediakan lokasi, baik itu di lokasi Desa Sumber Harapan ataupun di Kabupaten Sambas serta di Kota Pontianak sebagai sarana promosi dan penjualan produk-produk industri kecil kain tenun sambas. Pelaksanaan promosi ini tidak hanya dilakukan sekali setahun, tetapi harus dilakukan berulang dan terus menerus sampai sasaran dan tujuan promosi tercapai. Hasil penelitian ini masih bersifat teoritik, dengan demikian masih diperlukan kajian dan riset lebih lanjut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Antjok, J. 1995. Pemanfaatan Orga-nisasi Lokal untuk Mengentaskan Kemiskinan, dalam Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia, Adytia Media Yogyakarta.
- Cook, S., and Steve, M. 1997. Pemberdayaan yang Tepat. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Dewanta, A.S. 1996. Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia. Aditya Media, Yogyakarta.
- Friedmann, J. 1992. Empowerment : the Politics of Alternatif Development. Chambrige, Bllackwell, 1992.
- Giddens, A. 1999. The Third Way, Jalan Ketiga Pembaharuan De-mokrasi Sosial, PT. Gramedia, Jakarta.
- Hettne, B. 1982. Ironi Pembangunan di Negara Berkembang. Sinar Harapan, Jakarta.
- Hulme, D. & M. Turner. 1990. Sociologi of Development Theories, Politics and Practice, Harvester Wheatsheaf Hertfordshire.
- Irsan A., S. 1991. Industri Kecil, Sebuah Tinjauan dan Perbandingan, Edisi II, LP3ES, Jakarta.
- Kartasasmita, G. 1993. Kebijakan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan. FIA
- \_\_\_\_\_. 1995b. "Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tinjauan Administrasi", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Administrasi Pada FIA Unibraw, Malang.
- Korten, D. 1988. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Yayasan Obor, Jakarta.
- Mubyarto. 1994. Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal, Aditya Media, Yogyakarta.
- Mubyarto. 1999. Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan, Aditya Media, Yogyakarta.
- Pranarka, AMW dan Prijono, O.S. 1996. Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi. CSIS, Jakarta.
- Sumodiningrat G. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan JPS. PT Gramedia, Jakarta.
- Syamsi, I., 1986. Pokok-Pokok Kebijakan Perencana Pemrograman dan Pengganguran Pembangunan tingkat Nasional dan Regional. Rajawali, Jakarta.
- Tjokrowinoto, M. 1993. Politik Pembangunan: Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi. PT Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Tobing, S.L. 1983. Cara-Cara Mendirikan Usaha Industri Kerajinan Rumah Tangga, DKI, Jakarta.